

KAJIAN MANAJEMEN STRATEGIK PERAN DINAS SOSIAL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT DI KABUPATEN KARAWANG

BANUARA NADEAK

banuaranadeak@gmail.com

FEB UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl H.S Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur Karawang, Indonesia

ABSTRAK

Arah pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Karawang mengacu pada pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan kekhususan ciri sasaran garapan sesuai dengan lingkup cakupan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Adapun kekhususan ciri sasaran garapan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah manusi yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, termasuk dalam lingkup cakupan sasaran garapan ini adalah penyandang cacat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan penyandang cacat. Instrumen analisis yang digunakan adalah Analisis Kebijakan Publik yaitu dengan menggunakan Analisis perumusan masalah model William N Dunn dan Kajian Manajemen Strategik dengan menggunakan Analisis strategik dan pilihan metode SWOT terhadap Faktor Kunci Keberhasilan sehingga rendahnya penanganan penyandang cacat di Kabupaten Karawang harus mendapat perhatian serius dari Dinas Sosial sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung secara teknis dalam pembinaannya, kondisi tersebut disebabkan oleh kompetensi aparatur yang belum memadai.

Kata Kunci : Manajemen Strategik, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila dan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pencerminan dari tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UU Dasar 1945, beberapa Pasal UUD 1945 memberikan anamat kepada penyelenggara Negara untu mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan sosial, dan menjunjung hak asasi manusia yaitu antara lain pasal 27 ayat (2) dan pasal 34.

Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (*course of action*), kerangka kerja (*framwork*), petunjuk (*guidline*), rencana (*plan*), peta (*map*) atau strategi, yang dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (*sosial welfare*). Banyak arti yang diberikan pada istilah kesejahteraan sosial, Menurut Howard Jones (1990), tujuan utama kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama adalah pembinaan kemiskinan ke dalam berbagai manifestasi. “*The achievement of sosial welfare means, first and foremost, the allevation of poverty in its many manifestation*”.

Masalah pokok yang dihadapi dalam upaya penanganan masalah sosial penyandang cacat adalah masih rendahnya penilaian masyarakat terhadap kapasitas dan potensinya, kurangnya partisipasi masyarakat serta pribadi para penyandang cacat itu sendiri, yang umumnya banyak mengalami hambatan-hambatan. Upaya penanganan masalah penyandang cacat bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan keluarga dan semua lapisan masyarakat. Populasi penyandang cacat di Kabupaten Karawang baik kuantitas maupun kualitas cenderung meningkat, apabila penanganannya tidak dilakukan secara kontinyu akan menambah kompleksitas permasalahan sosial, karena sebagian besar para penyandang cacat berasal dari pelosok pedesaan dan hidup dibawah garis kemiskinan.

INSTRUMEN ANALISIS

Instrumen analisis yang dapat digunakan dalam upaya mengoptimalkan peran Dinas Sosial di Kabupaten Karawang antara lain : (1) Analisis Kebijakan Publik yaitu dengan menggunakan Analisis perumusan masalah model William N Dunn yang dimulai dari situasi masalah, meta masalah, masalah substantif, sampai dengan masalah formal. (2) Kajian manajemen strategik dengan menggunakan Analisis Strategik dan pilihan metode SWOT terhadap Faktor Kunci Keberhasilan.

Manajemen strategik merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara pelaksanaannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Pearch dan Robinson (1997) dinyatakan bahwa manajemen strategik adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.

Prinsip dalam manajemen strategik adalah adanya formulasi strategi yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang sesungguhnya; adanya implementasi strategi yang menggambarkan cara mencapai tujuan (secara teknis implementasi strategi yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengalokasikan sumberdaya yang tersedia termasuk sumberdaya keuangan (dengan anggaran berbasis kinerja); serta evaluasi strategi yang mampu mengukur, mengevaluasi dan memberikan umpan balik bagi perbaikan strategi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan) yang artinya pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. “*empowerment aims to increase the power of disadvantaged*” (Jim Ife, 1995:56). Dari konsep tersebut, maka dalam pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan pengaruh dan kontrol sedangkan kelompok lemah merupakan sekelompok orang yang tidak memiliki daya atau kekuasaan.

Dalam analisis pemecahan masalah pemberdayaan penyandang cacat di Kabupaten Karawang menggunakan instrumen analisis dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan kajian kebijakan publik dan kajian manajemen strategik. Dari aspek kebijakan publik permasalahan pemberdayaan penyandang cacat dapat ditinjau dengan menerapkan teori William N Dunn, yaitu bagaimana merumuskan masalah kebijakan yang efektif dan efisien, sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, yaitu penyandang cacat dapat menjalankan fungsi sosial sebagaimana mestinya.

Kebijakan pemberdayaan penyandang cacat nampaknya belum dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari masih kecilnya penanganan penyandang cacat. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi bagaimana mengatasi pelaksanaan kebijakan penanganan penyandang cacat yang belum optimal dan komprehensif di Kabupaten Karawang. Dalam hubungan ini, perlu diidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi perlunya meningkatkan pemberdayaan penyandang cacat di Kabupaten Karawang dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategik yang mempengaruhinya. Menyikapi pada pembahasan hakikat permasalahan, maka dapat dirumuskan masalah kebijakan berdasarkan hasil analisis SWOT dan urutan prioritas strategi utama maka dapat ditentukan hanya 6 (enam) faktor kunci keberhasilan (FKK) sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur guna meningkatkan tertib administrasi berkas perkara tata usaha negara.
- b. Meningkatkan kualitas aparatur dalam menelaan berkas perkara agar menghasilkan penelaahan berkas perkara tata usaha negara yang proporsional.
- c. Lengkapi pengiriman berkas perkara ke kepaniteraan secara cepat dan proporsional
- d. Mengoptimalkan tupoksi untuk meningkatkan tertib administrasi berkas perkara tata usaha negara.

- e. Mengoptimalkan kewenangan dengan meningkatkan tertib administrasi berkas perkara tata usaha negara
- f. Dayagunakan kewenangan dalam penelaahan berkas berkaitan dengan jumlah berkas yang semakin meningkat.

Perumusan masalah kebijakan publik pemberdayaan penyandang cacat:

1. Situasi Masalah

Situasi masalah yang menjadi persoalan adalah pemberdayaan penyandang cacat belum optimal

2. Meta Masalah

Dari situasi masalah, selanjutnya dikembangkan dengan melakukan pencarian masalah, dan dihasilkan meta masalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi aparatur yang belum memadai
- b. Belum dimilikinya data base penyandang cacat
- c. Sarana dan prasarana serta anggaran terbatas
- d. Kerjasama dan koordinasi dalam pemberdayaan penyandang cacat belum efektif
- e. Jangkauan pelayanan masih terbatas
- f. Peranan masyarakat dan keluarga masih rendah
- g. Rendahnya dukungan dunia usaha dalam pemberdayaan penyandang cacat

3. Masalah Subtantif

Dari meta masalah diatas setelah dikembangkan dengan melakukan pendefinisian masalah, sehingga dipilih masalah substantif sebagai berikut :

- a. Kompetensi aparatur belum memadai
- b. Belum dimilikinya data base penyandang cacat
- c. Sarana dan prasarana serta anggaran terbatas
- d. Kerjasama dan koordinasi dalam pemberdayaan penyandang cacat belum efektif
- e. Jangkauan pelayanan masih terbatas
- f. Peranan masyarakat dan keluarga masih rendah

4. Masalah Formal

Setelah ditentukan masalah substantif dan dilakukan spesifikasi masalah maka dipilih masalah formal sebagai berikut :

- a. Kompetensi aparatur belum memadai
- b. Belum dimilikinya data base penyandang cacat
- c. Sarana dan prasarana serta anggaran terbatas
- d. Kerjasama dan koordinasi dalam pemberdayaan penyandang cacat belum efektif
- e. Jangkauan pelayanan masih terbatas

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dengan pendekatan kajian kebijakan publik, maka ada 5 masalah pokok yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam penanganan penyandang cacat, yaitu :

- 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan
- 2. Membangun sistem informasi aplikasi data penyandang cacat

3. Meningkatkan sarana, prasarana dan anggaran penunjang pemberdayaan penyandang cacat
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait dalam pemberdayaan penyandang cacat
5. Memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitas sosial penyandang cacat

Pemberdayaan penyandang cacat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik secara internal organisasi maupun eksternal organisasi, sehingga perlu berbagai pertimbangan dalam membuat suatu strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahannya. Dari hasil pencermatan lingkungan stratejik, maka pemberdayaan penyandang cacat di Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

Tabel 1. Identifikasi Lingkungan Stratejik

Internal	Eksternal
Kekuatan (<i>Strengths</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tupoksi yang jelas 2. Komitmen pimpinan tinggi 3. Kerjasama pimpinan dan staf baik 4. Tersedianya gedung pelatihan penyandang cacat 5. Adanya program pemberdayaan penyandang cacat 	Peluang (<i>Opportunities</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya UU, peraturan pemerintah dan perda Provinsi tentang penyandang cacat 2. Adanya alokasi dana APBD Kabupaten dan Provinsi 3. Tersedianya lembaga pelatihan pemberdayaan penyandang cacat di tingkat Provinsi dan Pusat 4. Adanya dukungan dari potensi sumber kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam pemberdayaan penyandang cacat 5. Hubungan yang baik dengan pemerintah Provinsi dan Pusat
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi aparatur belum memadai 2. Belum dimilikinya data base penyandang cacat 3. Sarana dan prasarana serta anggaran terbatas 4. Kerjasama dan koordinasi dalam penanganan penyandang cacat belum efektif 5. Jangkauan pelayanan masih terbatas 	Tantangan (<i>Threats</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak penyandang cacat yang belum diberdayakan 2. Rendahnya dukungan dunia usaha terhadap penyandang cacat 3. Masih adanya diskriminasi pada penyandang cacat 4. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah 5. Kurangnya pemahaman keluarga dan masyarakat terhadap pemberdayaan penyandang cacat

Setelah dilakukan pencermatan lingkungan stratejik internal dan eksternal, selanjutnya dilakukan pembobotan untuk menentukan KAFI dan KAFE sebagai berikut:

Tabel 2. Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

No	Faktor-faktor Internal Stratejik	Bobot	Rating	Skor	Kesimpulan (Prioritas)
	Kekuatan :				
1.	Adanya tupoksi yang jelas	14	4	56	I
2.	Komitmen pimpinan tinggi	13	4	52	II
3.	Kerjasama pimpinan dan staf baik	8	3	24	IV
4.	Tersedianya gedung pelatihan penyandang cacat	7	3	21	IV

5.	Adanya program pemberdayaan penyandang cacat	10	4	40	III
Kelemahan :					
1.	Masih banyak penyandang cacat yang belum diberdayakan	14	4	56	I
2.	Rendahnya dukungan dunia usaha terhadap penyandang cacat	8	4	32	IV
3.	Masih adanya diskriminasi pada penyandang cacat	12	4	48	II
4.	Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah	8	3	24	V
5.	Kurangnya pemahaman keluarga dan masyarakat terhadap pemberdayaan penyandang cacat	11	4	44	III
Jumlah		100			

Ket. Rating : 4 = Sangat Menonjol, 3 = Menonjol, 2 = Tidak Menonjol, 1 = Paling Menonjol

Tabel 3. Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

No	Faktor-faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Kesimpulan (Prioritas)
Peluang :					
1.	Adanya UU, peraturan pemerintah dan perda Provinsi tentang penyandang cacat	14	3	42	I
2.	Adanya alokasi dana APBD Kabupaten dan Provinsi	13	3	39	II
3.	Tersedianya lembaga pelatihan pemberdayaan penyandang cacat di tingkat Provinsi dan Pusat	8	3	24	IV
4.	Adanya dukungan dari potensi sumber kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam pemberdayaan penyandang cacat	11	3	33	III
5.	Hubungan yang baik dengan pemerintah Provinsi dan Pusat	6	3	18	V
Tantangan :					
1.	Kompetensi aparatur belum memadai	14	4	56	I
2.	Belum dimilikinya data base penyandang cacat	8	4	32	II
3.	Sarana dan prasarana serta anggaran terbatas	12	4	48	III
4.	Kerjasama dan koordinasi dalam penanganan penyandang cacat belum efektif	8	3	24	IV
5.	Jangkauan pelayanan masih terbatas	11	4	44	V
Jumlah		100			

Ket. Rating : 4 = Sangat Menonjol, 3 = Menonjol, 2 = Tidak Menonjol, 1 = Paling Menonjol

Analisis strategik dan pilihan adalah suatu analisis untuk menentukan asumsi strategik dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT yang akan menghasilkan 4 (empat) buah strategi yaitu strategi :

- a. Strategi S-O, yaitu pakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang
- b. Strategi S-T, yaitu pakai kekuatan untuk menghadapi tantangan atau mengubahnya menjadi peluang
- c. Strategi W-O, yaitu tanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
- d. Strategi W-T, yaitu perkecil kelemahan dan hindari tantangan

Tabel 4. KAFI VS KAFE (SWOT)

KAFI KAFE	<p>Strengths (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tupoksi yang jelas 2. Komitmen pimpinan tinggi 3. Adanya program pemberdayaan penyandang cacat 	<p>Weaknesses (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi aparatur belum memadai 2. Sarana dan prasarana serta anggaran terbatas 3. Jangkauan pelayanan masih terbatas
<p>Opportunities (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya UU, PP dan Perda Provinsi Jawa Barat tentang penyandang cacat 2. Adanya dukungan alokasi dana APBD 3. Adanya dukungan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (pekerja sosial masyarakat) dalam pemberdayaan penyandang cacat 	<p>Asumsi Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalkan tupoksi yang jelas dalam pemberdayaan penyandang cacat dengan memanfaatkan UU, PP dan Perda Provinsi Jawa Barat, dukungan alokasi dana APBD serta dukungan dari potensi sumber kesejahteraan sosial 2. Memantapkan komitmen pimpinan dalam pemberdayaan penyandang cacat dengan dukungan UU, PP dan Perda Provinsi Jawa Barat, dukungan alokasi dana APBD serta dukungan dari potensi sumber kesejahteraan sosial 3. Memanfaatkan program pemberdayaan yang ada dalam pemberdayaan penyandang cacat dengan dukungan alokasi dana APBD serta dukungan dari potensi sumber kesejahteraan sosial 	<p>Asumsi Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan profesionalisme, budaya kerja, integritas, loyalitas, dan tanggung jawab aparatur dalam penanggulangan penyandang cacat dengan dukungan UU, PP dan Perda Provinsi Jawa Barat, dukungan alokasi dana APBD serta dukungan dari potensi sumber kesejahteraan sosial 2. Tingkatkan kualitas sarana, prasarana dan anggaran dalam pemberdayaan penyandang cacat dengan dukungan UU, PP dan Perda Provinsi Jawa Barat, dukungan alokasi dana APBD serta dukungan dari potensi sumber kesejahteraan sosial 3. Optimalkan jangkauan pelayanan dalam pemberdayaan penyandang cacat yang didukung UU, PP dan Perda Provinsi Jawa Barat, dukungan alokasi dana APBD serta dukungan dari potensi sumber kesejahteraan sosial
<p>Threats (Tantangan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya jumlah penyandang cacat yang belum diberdayakan 2. Rendahnya dukungan dunia usaha terhadap penyandang cacat 3. Masih adanya diskriminasi terhadap penyandang cacat 	<p>Asumsi Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tupoksi Dinas dalam pemberdayaan penyandang cacat karena masih banyaknya penyandang cacat yang belum diberdayakan rendahnya dukungan dunia usaha dan masih adanya diskriminasi terhadap penyandang cacat 2. Mantapkan komitmen pimpinan dalam pemberdayaan penyandaang cacat untuk menangani masih banyaknya penyandang cacat yang belum diberdayakan ; rendahnya dukungan dunia usaha terhadap penyandang cacat dan masih adanya diskriminasi terhadap penyandang cacat 3. Optimalkan program pemberdayaan penyandang cacat untuk menangani masih banyaknya jumlah penyandang cacat yang belum diberdayakan; rendahnya dukungan dunia usaha terhadap penyandang cacat dan masih adanya diskriminasi terhadap penyandang cacat 	<p>Asumsi Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan kemampuan yang ada untuk menangani banyaknya penyandang cacat yang belum diberdayakan; masih rendahnya dukungan dunia usaha terhadap penyandang cacat dan adanya diskriminasi terhadap penyandang cacat 2. Manfaatkan sarana, prasarana dan anggaran dalam pemberdayaan penyandang cacat untuk menghadapi banyaknya penyandang cacat yang belum diberdayakan; masih rendahnya dukungan dunia usaha terhadap penyandang cacat dan adanya diskriminasi terhadap penyandang cacat 3. Upayakan jangkauan pelayanan dalam pemberdayaan penyandang cacat untuk menghadapi penyandang cacat yang belum diberdayakan; masih rendahnya dukungan dunia usaha terhadap penyandang cacat dan adanya diskriminasi terhadap penyandang cacat

Berdasarkan urutan asumsi pilihan strategi, maka penulis hanya menetapkan 4 asumsi pilihan strategi yang sangat atau paling mempengaruhi terhadap pemberdayaan penyandang cacat yaitu :

1. Tingkatkan profesionalitas, etos kerja, budaya kerja, integritas, loyalitas, dan tanggung jawab aparatur dalam penanggulangan penyandang cacat dengan dukungan uu, PP dan Perda Provinsi Jawa Barat, dukungan alokasi dana APBD serta dukungan dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2. Tingkatkan kualitas sarana, prasarana dan anggaran dalam pemberdayaan penyandang cacat dengan dukungan UU, PP dan Perda Provinsi Jawa Barat, dukungan alokasi dana APBD serta dukungan dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
3. Optimalkan jangkauan pelayanan dalam pemberdayaan penyandang cacat yang di dukung UU, PP dan Perda Provinsi Jawa Barat, dukungan alokasi dana APBD serta dukungan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
4. Optimalkan tupoksi yang jelas dalam pemberdayaan penyandang cacat dengan memanfaatkan UU, PP dan Perda Provinsi Jawa Barat, dukungan alokasi dana APBD serta dukungan dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Keempat asumsi strategi utama tersebut dapat dijadikan sebagai FKK untuk peningkatan pemberdayaan penyandang cacat di Kabupaten Karawang. Faktor kunci keberhasilan terhadap pemberdayaan penyandang cacat sesuai dengan pilihan strategi utama dan misi yang akan dilaksanakan adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada matrik berikut ini :

Tabel 5. Perumusan Faktor Kunci Keberhasilan

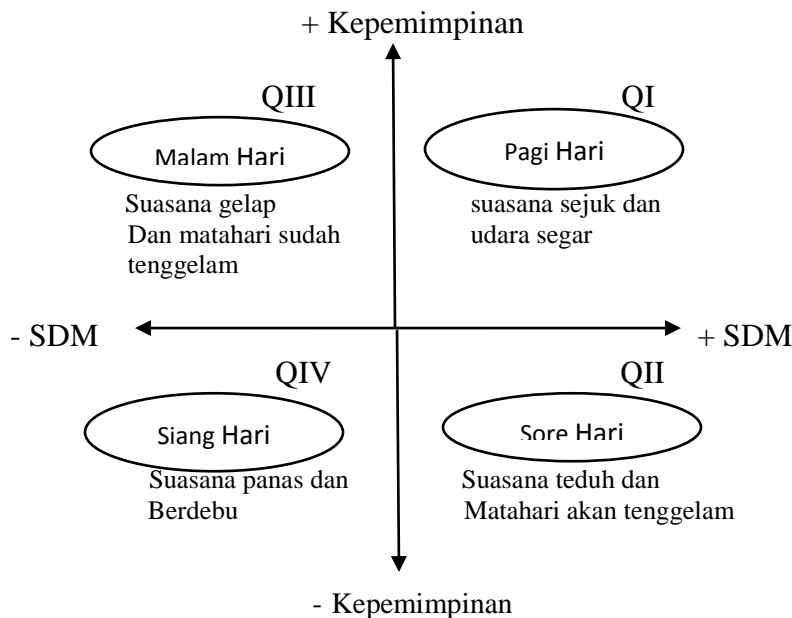
<p>Urutan Pilihan Strategi</p> <p>MISI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan profesionalisme, etos kerja, budaya kerja, integritas, loyalitas, dan tanggung jawab aparatur dalam penanggulangan penyandang cacat dengan dukungan UU, PP dan Perda Provinsi Jawa Barat, dukungan alokasi dana APBD serta dukungan dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2. Tingkatkan kualitas sarana, prasarana dan anggaran dalam pemberdayaan penyandang cacat dengan dukungan UU, PP dan Perda Provinsi Jawa Barat, dukungan alokasi dana APBD serta dukungan dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 3. Optimalkan jangkauan pelayanan dalam pemberdayaan penyandang cacat yang didukung UU, PP dan Perda Provinsi Jawa Barat, dukungan alokasi dana APBD serta dukungan dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 4. Optimalkan tupoksi yang jelas dalam pemberdayaan penyandang cacat dengan memanfaatkan UU, PP dan Perda Jawa Barat, dukungan alokasi dana APBD serta dukungan dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem bantuan, perlindungan dan jaminan sosial 2. Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial 3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia 4. Meningkatkan partisipasi dan kesetiakawanan sosial masyarakat 5. Meningkatkan kesetaraan gender 6. Meningkatkan nilai-nilai keperintiasan, kepahlawanan dan kejujuran 	<p>Faktor Kunci Keberhasilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tingkatan profesionalisme, etos kerja, budaya kerja, integritas, loyalitas, dan tanggung jawab aparatur 2. Tersedianya dukungan sarana, prasarana dan anggaran penunjang pemberdayaan penyandang cacat yang memadai 3. Adanya optimalisasi jangkauan pelayanan dalam pemberdayaan penyandang cacat 4. Adanya optimalisasi tupoksi yang jelas dalam pemberdayaan penyandang cacat

Setelah dapat diketahui Faktor Kunci Keberhasilan (FKK), maka langkah selanjutnya dirumuskan rencana strategik untuk pemberdayaan penyandang cacat di Kabupaten Karawang. Rumusan strategik terdiri dari perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program. Adapun formulasi tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Perumusan Tujuan

<p>FKK</p> <p>MISI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tingkatan profesionalitas, etos kerja, budaya kerja, integritas. Loyalitas, dan tanggung jawab aparatur 2. Tersedianya dukungan sarana, prasarana dan anggaran penunjang pemberdayaan penyandang cacat yang memadai 3. Adanya optimalisasi jangkauan pelayanan dalam pemberdayaan penyandang cacat 4. Adanya optimalisasi tupoksi yang jelas dalam pemberdayaan penyandang cacat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem bantuan, perlindungan dan jaminan sosial 2. Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial 3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia 4. Meningkatkan partisipasi dan kesetiakawanan sosial masyarakat 5. Meningkatkan kesetaraan gender 6. Meningkatkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan 	<p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan aparatur yang profesional dan memiliki moralitas tinggi 2. Menyediakan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai 3. Mewujudkan optimalisasi jangkauan pelayanan 4. Mewujudkan optimalisasi tupoksi yang jelas

Peningkatan peran kepemimpinan aparatur dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur dalam analisis pemecahan dengan mengimplementasikan scenario planning bervariasi dalam pentahapannya, yaitu :



Gambar 1. : Matrix Scenario

Selanjutnya disusun narasi skenario sebagai berikut :

1. Pagi hari atau skenario 1, merupakan dambaan bagi seluruh instansi pemerintah dengan ciri-ciri kepemimpinan dan SDM aparatur yang profesional, akuntabel dan responsive serta berperilaku dan bermoral sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Profesional berlandaskan etia/perilaku dan moral yang tinggi, efisien dan efektif.
2. Sore hari atau skenario 2, fungsi aparatur yang sudah baik sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kurang didukung oleh gaya/model kepemimpinan yang profesional.
3. Malam hari atau skenario 3, kebijakan kepemimpinan yang profesional dan akuntabel, namun kurang didukung oleh aparatur pelaksanakebijakan yang profesional, maka kebijakan kurang efektif dan efisien. Sebab kinerja yang rendah mengakibatkan kualitas SDM juga tidak akan berkembang.
4. Siang hari atau skenario 4, yang tidak didambakan sama sekali oleh setiap instansi pemerintah dengan ciri-ciri kepemimpinan aparatur yang tidak didasarkan pada profesionalisme tidak akuntabel serta rendah perilaku dan moral hasilnya akan jauh dari harapan

Berdasarkan ciri-ciri skenario diatas, pemilihan skenario jatuh pada skenario pertama yaitu skenario pagi hari karena menggambarkan gaya kepemimpinan yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi sebagai instansi yang diserahi tugas dalam penyelenggaraan kebijakan publik tentang pengelolaan keuangan daerah. Kepemimpinan yang profesional dan akuntabel merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tupoksi di lingkungan Dinas Sosial dalam upaya optimalisasi pemberdayaan penyandang cacat.

KESIMPULAN

1. Rendahnya penanganan penyandang cacat di Kabupaten Karawang harus mendapat perhatian serius dari Dinas Sosial sebagai instansi yang bertanggungjawab langsung secara teknis dalam pembinaannya, kondisi tersebut disebabkan oleh kompetensi aparatur yang belum memadai.
2. Pemberdayaan penyandang cacat di Kabupaten Karawang belum dapat dilaksanakan secara optimal karena belum didukung oleh data base penyandang cacat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development Creating Community Alternatives : Vision, Analysis and Practice*. Australian : Longman.
- Pearce dan Robinson. 1997. *Manajemen Strategis*. Jakarta : Binarupa Aksara.